

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Demi menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) berbagai upaya terus dilakukan oleh berbagai pihak, dalam hal ini termasuk didalamnya sebagai pihak utama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Perguruan Tinggi baik itu negeri maupun Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ada pula keterlibatan dari para pemerhati keadilan yakni lembaga independen yang pada akhirnya membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH), itu semua agar tercapainya keadilan bagi masyarakat luas. Dan untuk dapat memberikan bantuan hukum secara leluasa setiap membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus melalui tahap seleksi yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimaksud adalah dengan mengikuti tahap verifikasi dan akreditasi.

Berdasarkan data pada proses verifikasi pertama di tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) di seluruh propinsi di Indonesia. Ada sejumlah 579 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang mendaftar untuk diverifikasi oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), namun dari jumlah tersebut, hanya ada sekitar 310 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang lolos proses verifikasi dengan nilai akreditasi A sebanyak 10 OBH, nilai akreditasi B sebanyak 21 Organisasi Bantuan Hukum dan nilai akreditasi C sebanyak 279 Organisasi Bantuan Hukum. Dari 310 Organisasi Bantuan Hukum tersebut, ada sekitar 44% Organisasi Bantuan Hukum yang beroperasi di Jawa dan 26% di Sumatera, sementara 30% sisanya tersebar di berbagai wilayah lainnya. Kemudian, di dalam proses verifikasi kedua untuk tahun anggaran 2016-2018, jumlah pemberi bantuan hukum meningkat menjadi 405 Organisasi Bantuan Hukum yang terverifikasi dengan akreditasi A sebanyak 13 Organisasi Bantuan Hukum, akreditasi B sebanyak 61

Organisasi Bantuan Hukum dan akreditasi C sebanyak 331 Organisasi Bantuan Hukum.¹

Data diatas, merupakan data hasil dari SK KEMENKUMHAM yang diperuntukan pada periode 2016 sampai dengan 2018. Berbeda halnya dengan dikeluarkanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : m.hh-01.hn.07.02 tahun 2018 tentang lembaga/organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode tahun 2019 s.d. 2021, jumlah LBH yang memberikan bantuan hukum semakin meningkat yakni dengan total keseluruhan terhitung 524 yang lolos verifikasi dan akreditasi.²

Uraian data diatas merupakan sejumlah Lembaga Bantuan Hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi, belum lagi yang tidak lolos verifikasi dan akreditasi. Hal tersebut menunjukan selain jumlah yang semakin meningkat juga terlihat, sejumlah pemerhati keadilan yang sedang berlomba-lomba untuk memberikan akses keadilan yang sangat luas bagi penerima bantuan hukum, dan merupakan sebuah progres yang baik bagi pemerhati keadilan maupun bagi pejuang keadilan. Hal tersebut tentu menarik perhatian penulis

¹ Yasmin Purba, *Akses Terhadap Bantuan Hukum Dan Kendala-Kendala Di Dalam Pelaksanaannya*.dalam link https://www.academia.edu/26029202/akses_terhadap_bantuan_hukum_dan_kendala-kendala_di_dalam_pelaksanaannya. Di akses 1 Maret 2019.

² keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor : m.hh-01.hn.07.02 tahun 2018 tentang *lembaga/organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode tahun 2019 s.d. 2021* Dalam Link https://www.bphn.go.id/data/documents/sk_menkumham_verasi_pbh_2019-2021.pdf. Diakses 1 Maret 2019.

untuk mengetahui dan memahami baik itu sejumlah Lembaga Bantuan Hukum yang lolos verifikasi dan akreditasi maupun sejumlah Lembaga Bantuan Hukum yang belum lolos verifikasi dan akreditasi khususnya sejumlah Lembaga Bantuan Hukum yang berada di wilayah Malang Jawa Timur (JATIM). Berikut diuraikan lembaga yang berperan memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat tidak mampu.

Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang didirikan di Malang pada tanggal 27 Maret 1997. BKBH Universitas Muhammadiyah Malang didirikan oleh Fakultas Hukum dan didukung oleh beberapa dosen yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum (*law enforcement*) di tanah air, khususnya “*access to justice*” bagi warga masyarakat yang kurang mampu baik secara ekonomi, sosial maupun politik serta warga masyarakat yang terpinggirkan.

Sehingga BKBH UMM merumuskan visi-visi dan program kerja yang memberikan beberapa solusi yang dapat membantu permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat tidak mampu. Yang dimaksud ialah memberikan pelayanan hukum baik secara litigasi maupun nonlitigasi. Sebagaimana diketahui sebagian besar masyarakat kita masih dalam taraf garis kemiskinan. Jangankan untuk membayar biaya perkara ke pengadilan dan membayar pengacara (advokat), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat primer saja mereka sudah mengalami kesulitan. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan kebutuhan terhadap keadilan juga sangatlah mereka butuhkan terutama terkait dengan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

Melihat situasi sulit dan kompleks yang dihadapi oleh warga masyarakat tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang dengan didukung oleh beberapa dosen menggagas berdirinya sebuah lembaga yang memiliki

komitmen dan kepedulian dalam memberikan “bantuan hukum” kepada warga masyarakat yang kurang mampu dan yang terpinggirkan itu. Lembaga yang dimaksud kemudian dikenal dengan nama “Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum” yang disingkat dengan “BKBH”.³

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Neraatja Justitia Kota Malang adalah lembaga yang juga memiliki kesamaan orientasi dengan LBH pada umumnya. LBH ini juga bergerak untuk melayani kepentingan sosial yang melingkupi pemberian pelayanan hukum secara gratis kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum yang dimaksud adalah perseorangan atau kelompok masyarakat miskin. Pendirian LBH inipun tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, seperti UU bantuan hukum dan perundang-undangan lainnya.⁴

Melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

³ Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam link <http://bkbh.umm.ac.id/id/pages/psrofil.html>. Diakses 2 maret 2019

⁴ [Wawancara dengan Mursalim Nasarudin, LBH Neraatja Justitia. 2 maret 2019.](#)

dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Dengan demikian melihat uraian diatas, penulis terdorong keinginan untuk menelaah program bantuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal dimaksud adalah tentang bagaimana efektivitas dari pelaksanaan bantuan hukum Nonlitigasi oleh lembaga bantuan hukum yang diberi tanggung jawab oleh perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian diatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Neratja Justitia Kota Malang?
2. Apa saja kendala dalam pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Neratja Justitia Kota Malang?

C. Tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengetahui dan mencapai pengetahuan, yakni :

1. Mengetahui dan mengkaji efektifitas pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Neratja Justitia kota malang, berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.
2. Mengetahui dan mengkaji berbagai hambatan dalam pemberian Bantuan Hukum non litigasi Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Neratja Justitia Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Peneliti atau akademisi, Masyarakat dan aparat penegak hukum yang akan datang), dan secara komprehensif diuraikan sebagai berikut.

1. Bagi Penulis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru bagi penulis dalam memahami praktek pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu serta menjadi syarat

akademik untuk memperoleh gelar strata 1 (satu) di Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Masyarakat.

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat, dapat memberikan gambaran konkrit mengenai hak-hak hukum nonlitigasi yang harus diakses olehnya (masyarakat), sehingga nantinya akan memberikan nilai solutif bagi masyarakat luas.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum.

Terkhusus aparat penegak hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum yang berhubungan langsung dengan praktek di lapangan, bagi penulis hasil dari penelitian ini menjadi prioritas utama untuk diketahui olehnya, sehingga penulis mengharapkan kepada aparat penegak hukum dapat menjadi dasar bahan evaluasi serta adanya peningkatan kinerja dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi yang proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kegunaan Penelitian.

Dalam penelitian ini, tentu menginginkan suatu kegunaan bagi pihak-pihak terkait, yakni yang menjadi obyek dalam penelitian, hal dimaksud adalah Kegunaan ini akan menunjuk pada Obyek, yakni aparat penegak hukum dalam hal ini Advokat, Paralegal dan masyarakat penerima bantuan hukum, yang diharapkan dengan adanya penelitian ini akan menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dalam memahami efektivitas pelaksanaan

pemberian bantuan hukum nonlitigasi, oleh Lembaga Bantuan Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam beberapa undang-undangan yakni Undang-undang No 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan atau Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dan peraturan pelaksana lainnya.

Selain dari pada uraian diatas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai-nilai praktis bagi aparat penegak hukum (Advokat, Paralegal dan masyarakat penerima bantuan hukum), terkhusus dalam memahami sejauhmana efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum nonlitigasi, oleh Lembaga Bantuan Hukum menjalankan atau memberikan bantuan hukum Nonlitigasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan atau Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum beserta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kalangan akademisi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dikemudian hari, sehingga dalam aspek-aspek tertentu dapat memberikan nilai-nilai solutif dalam menilai tentang efektivitas pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi oleh lembaga bantuan hukum, yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan ini.

Mengacu pada uraian diatas memiliki pengertian bagaimana kegunaan dari penelitian ini, dapat menjadi sumber acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan sistem penilaian dalam rangka pemajuan ilmu pengetahuan dikemudian hari serta menjadi acuan praktis dalam proses penegakan hukum, sehingga nantinya akan memberikan nilai lebih bagi masyarakat luas.

F. Metode Penelitian.

1. Uraian metode Pendekatan yaitu Untuk mempermudah atau menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Penulis dalam hal ini memakai pendekatan Yuridis Sosiologis yakni pendekatan yang melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Pendekatan ini memiliki pengertian, bahwa untuk mengetahui data secara komprehensif diperlukan adanya pendekatan secara langsung melalui instansi-instansi terkait seperti lembaga bantuan hukum yang akan menjadi obyek dari penelitian. Dalam penelitian tersebut penulis juga memakai teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier.⁵

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah Lembaga Bantuan Hukum yang berada di wilayah kecamatan dan Kota di daerah Malang. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum

⁵ *Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Tahun 2016. Hal 16.

(BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang dan Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia Kota Malang.

Adapun alasan dari pemilihan lokasi ini ialah, sebagai berikut :

- a. Jika melihat visi-misi dari kedua Lembaga Bantuan Hukum ini, sama-sama memiliki kesamaan orientasi dalam memperjuangkan hak-hak yang harus diperoleh masyarakat tidak mampu, sebagaimana telah terurai dalam latar belakang masalah. Dalam hal ini Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pencapaian pelaksanaan pemberian bantuan hukum Nonlitigasi dari kedua Lembaga Bantuan Hukum tersebut.
- b. Selain dari pada uraian angka satu diatas, bahwa di tahun 2018 kedua Lembaga Bantuan Hukum ini juga mengikuti program verifikasi dan akreditasi yang diselenggarakan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah menetapkan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang Lolos atau tidak dalam tahap verifikasi dan akreditasi. Dan Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang sendiri sebagaimana telah dinyatakan lolos melalui keputusan KEMENKUMHAM tahun 2018. Sedangkan Lembaga Bantuan Hukum Neratja dinyatakan tidak lolos verifikasi dan akreditasi, inti dari ketertarikan penulis dalam studi komparatif Lembaga Bantuan Hukum ini adalah karena juga memiliki usia yang bisa dikatakan masih dini dalam pendiriannya yakni pada tahun 2016, sehingga ini salah satu alasan khusus bagi penulis memilih lokasi penelitian ini.

3. Jenis Data.

a. Data Primer.

Data hukum primer adalah jenis data, dokumen tertulis, file, rekaman, informasi pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber utama di lapangan. Yang dimaksud ialah pada data hukum primer penulis akan memperoleh data melalui wawancara langsung kepada responden yang ada di kedua Lembaga Bantuan Hukum dimana yang menjadi tempat atau lokasi penelitian tersebut, yakni Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang dan Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia.

b. Data Sekunder.

Data sekunder Adalah dapat kita sebut dengan istilah studi pustaka, seperti jenis data dokumen tertulis, file, rekaman, informasi pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber kedua, seperti buku, jurnal, pendapat para ahli yang mendukung dan berkaitan dengan obyek penelitian dan lain-lain.

c. Data Tersier.

Merupakan jenis data yang menjelaskan mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari Ensiklopedia, Kamus dan lain-lain yang mendukung atau berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Sehingga akan mempermudah penulis dalam mendeskripsikan yang

berupa pengertian atau definisi, istilah-istilah hukum dalam penelitian ini, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data.

1. Observasi.

Yakni metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Penulis akan melakukan pengamatan keadaan melalui studi kasus atau peristiwa hukum yang ada di kota/kab Malang yang berkaitan dengan sejauhmana keterlibatan kedua Lembaga Bantuan Hukum yang menjadi tempat atau lokasi penelitian tersebut, yakni Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang dan Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia kota Malang dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi.

2. Wawancara.

Yakni adalah suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan responden yang dianggap mengetahui banyak tentang masalah penelitian dan dalam melakukan wawancara penulis menggunakan metode purposive sampling (memilih responden).⁶ Responden yang dimaksud adalah Kepala atau Anggota yang ditunjuk yang memiliki kedudukan sebagai Fungsionaris dalam Lembaga Bantuan Hukum tersebut. Untuk Badan Konsultasi dan

⁶ *Ibid* hal 17

Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang yang akan menjadi Responden adalah Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.HUM. Sedangkan Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia Kota Malang adalah Bendi, S.H.

3. Studi Dokumen.

Yang dimaksud ialah Dokumen yang dimiliki oleh Lembaga bantuan hukum. Dokumen hukum ini sangat diperlukan oleh penulis karena hal ini adalah sebagai metode penulis dalam menelaah data/dokumen hukum yang ada di kedua Lembaga Bantuan Hukum yakni Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang dan Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia, sehingga akan membantu dalam menganalisis serta memecahkan masalah atau yang menjadi topik penting dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data.

Penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yang dimaksud adalah telaah data melalui uraian yang menjelaskan suatu keadaan konkret yang berkenaan dengan obyek penelitian yaitu berhubungan dengan tema besar dalam penelitian ini. Tegasnya penulis akan menguraikan dan menjelaskan keadaan-keadaan factual atau rangkaian peristiwa hukum secara sistematis yang memiliki relevansinya dengan topik yang diangkat.⁷

⁷ *Ibid* hal 17

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab dan sub-sub bab, sehingga mempermudah penulis dan pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian dalam tiap-tiap bab, berikut diuraikan

1. Bab I Pendahuluan.

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian hukum yang diangkat yaitu tentang tingkat keefektifan dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum Nonlitigasi oleh lembaga bantuan hukum yakni Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang dan Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ahli Hukum Soerjono Soekanto tentang factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, dan teori atau pendapat yang dikemukakan oleh Ahli hukum Lawrence Friedman tentang factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Sebagaimana uraian diatas adalah Sumber utama untuk mengetahui dan mengkaji sedangkan sumber lain adalah kamus atau ensiklopedia,

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempermudah penulis dan pembaca memahami Tulisan dalam penelitian ini.

3. Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Pada Bab III ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan perbandingan serta analisa tentang sejauhmana efektivitas dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum Nonlitigasi oleh lembaga bantuan hukum, antara Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Muhammadiyah Malang dengan Lembaga Bantuan Hukum Neratja Justitia kota malang yang menjadi obyek penelitian. Selain dari uraian tersebut juga akan menguraikan atau mendeskripsikan tentang profil-profil dari kedua lembaga bantuan hukum tersebut.

4. Bab IV Penutup.

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atau berupa rekomendasi dari hasil penelitian atas rumusan kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab I, bab II, dan bab III yang disertai dengan uraian daftar pustaka serta lampiran-lampiran.